

Misi 4 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa						
Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih						
Sasaran Daerah : Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi						
Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat						
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab	
Indikator Kineja Program (Esselon II)						
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	1. Komponen Perencanaan; 2. Pengukuran Kinerja; 3. Pelaporan Kinerja; 4. Evaluasi KInerja; 5. Capaian Kinerja.	Capaian nilai SAKIP Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten Kategori :		Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
				Peringkat	Nilai	
				AA	> 90-100	
				A	> 80-90	
				BB	> 70-80	
				B	> 60-70	
				CC	> 50-60	
				C	> 30-50	
				D	0-30	

2	Meningkatnya Kerjasama dan penyelenggaraan adminstrasi pemerintahan	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Diperoleh Melalui Akumulasi Capaian Kinerja Makro, Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Dan Perubahan Kinerja Makro	$KPPD = [ CKM + CKUP ] \times 0.75 + [ PKM ] \times 0.25$ Ket : 1. 1.00 – 1.80 Sangat Rendah 2. 1.81 – 2.60 Rendah 3. 2.61 – 3.40 Sedang 4. 3.41 – 4.20 Tinggi 5. 4.21 – 5.00 Sangat Tinggi	Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3	Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Capaian Realisasi Cakupan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	$\frac{\Sigma \text{ Realisasi Cakupan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat}}{\Sigma \text{ Target Cakupan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat}} \times 100$	Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat


Misi 4 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa					
Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih					
Sasaran Daerah : Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi					
Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					
No	Program	Indikator Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
Indikator Kineja Program (Esselon III)					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dibagi Jumlah Kegiatan yang diampu	$\frac{\sum \text{Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi}}{\sum \text{Jumlah Kegiatan yang diampu}} \times 100$	Kepala Bagian Pemerintahan
2	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Persentase Realisasi Kebijakan Kerjasama Pemerintahan	Capaian Realisasi Kebijakan Kerjasama Pemerintahan Terhadap Kebijakan Kerjasama Pemerintahan	$\frac{\sum \text{Realisasi Kebijakan Kerjasama Pemerintahan}}{\sum \text{Target Kebijakan Kerjasama Pemerintahan}} \times 100$	Kepala Bagian Pemerintahan
		Persentase Realisasi Kebijakan Administrasi Kewilayahan	Capaian Realisasi Kebijakan Administrasi Kewilayahan Terhadap Target Kebijakan Administrasi Kewilayahan	$\frac{\sum \text{Realisasi Kebijakan Administrasi Kewilayahan}}{\sum \text{Target Kebijakan Administrasi Kewilayahan}} \times 100$	Kepala Bagian Pemerintahan
		Persentase Realisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Capaian Realisasi Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Target Kebijakan Otonomi Daerah	$\frac{\sum \text{Realisasi Kebijakan Otonomi Daerah}}{\sum \text{Target Kebijakan Otonomi Daerah}} \times 100$	Kepala Bagian Otonomi Daerah

3	Program Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Realisasi Fasilitas Pembinaan Mental Spiritua	Capaian Cakupan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual Terhadap Target Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual	$\frac{\Sigma \text{Cakupan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual}}{\Sigma \text{Target Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual}} \times 100$	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Persentase Rumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Capaian Rumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	$\frac{\Sigma \text{Realisasi Kebijakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar}}{\Sigma \text{Target Kebijakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar}} \times 100$	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Persentase Rumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Capaian Rumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	$\frac{\Sigma \text{Realisasi Kebijakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar}}{\Sigma \text{Target Kebijakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar}} \times 100$	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Serang,

2022

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BANTEN



GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si

NIP. 19741004 199402 1 002